



# RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2026



**BALAI PPMHKP  
SEMARANG**

## KATA PENGANTAR

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang (Balai PPMHKP Semarang) sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” maka Balai PPMHKP Semarang menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOB, CDOIB) dan sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI ISO/IEC 17020:2012 dan SNI ISO 37001:2016 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Balai PPMHKP Semarang untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Balai PPMHKP Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Balai PPMHKP Semarang di tahun kedepannya.

Demikian RKT Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.



Semarang, 31 Januari 2026

Plt. Kepala Balai PPMHKP Semarang

Dr. Titis Candra Dewi, S.Pi., M.Sc.

## DAFTAR ISI

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                              | <b>5</b>  |
| <br>                                                  |           |
| <b>Pendahuluan .....</b>                              | <b>6</b>  |
| Latar Belakang .....                                  | 6         |
| Tugas dan Peran Organisasi.....                       | 6         |
| Tujuan.....                                           | 8         |
| Manfaat.....                                          | 9         |
| Sasaran .....                                         | 9         |
| <br>                                                  |           |
| <b>Rencana Kinerja Tahunan .....</b>                  | <b>10</b> |
| Rencana Strategis, Visi dan Misi .....                | 10        |
| Arah Kebijakan .....                                  | 13        |
| Sasaran Strategis BPPMHKP dan Indikator Kinerja ..... | 13        |
| <br>                                                  |           |
| <b>Penutup .....</b>                                  | <b>22</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Indikator Kinerja BPPMHKP TA 2026.....                                                                                                        | 16 |
| Tabel 2. Indikator Kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil<br>Kelautan dan Perikanan Semarang Tahun 2026.....                             | 18 |
| Tabel 3. Alokasi anggaran perkegiatan pada program Balai Pengendalian dan<br>Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang tahun 2026<br>..... | 22 |

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan mengamanatkan bahwa Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Unit Eselon I.

Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kurun waktu tahun 2025–2029 dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis BPPMHKP 2025 – 2029 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dibidang Kelautan dan Perikanan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit pelaksana teknis yang mengampu program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan.

Didalam penjabaran per tahun Rencana Aksi Kegiatan Balai PPMHKP Semarang 2025-2029, maka dibuatlah dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang tetap harus menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen diatasnya (Renstra, RPJMN).

## Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara adalah pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara dan Perpres ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu perubahan dari Permen KKP Nomor 19 Tahun 2010 terkait pengendalian mutu menjadi Permen KP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerjanya, KKP tetap mempertahankan unsur pengendalian mutu dengan membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, yaitu sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis dari pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam menjaga serta menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok melalui *quality assurance*, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional dalam rangka meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelautan dan hasil perikanan Indonesia. Dengan demikian peranan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.



Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang BPPMHKP yang mendapat mandat sebagai otoritas kompeten dalam pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, antara lain berperan dalam pelaksanaan sertifikasi inspeksi dan *surveillance*. Dengan demikian peranan BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu Balai PPMHKP Semarang sebagai UPT BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan program KKP melalui ekonomi biru. Dengan demikian peran UPT Balai PPMHKP Semarang cukup strategis dalam rangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor dan antar area komoditi perikanan yang lancar, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

## Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Balai PPMHKP Semarang pada tahun 2026.



## Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Balai PPMHKP Semarang dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

## Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai PPMHKP Semarang adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai PPMHKP Semarang Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai PPMHKP Semarang tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai PPMHKP Semarang pada tahun 2026.

## Rencana Kinerja Tahunan

### Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi KKP di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.

2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni :
  - a) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat.
  - b) Inovasi dan Riset KP menguat.
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
  - a) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
  - b) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
  - c) Pengawasan pengelolaan SDKP.
  - d) Pengelolaan ruang laut optimal.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni :

Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni :

Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil perikanan mengandung arti semua produk yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi mengandung arti hasil perikanan yang Sehat, memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan (Bermutu), dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman konsumsi) serta tidak merusak kelangsungan sumberdaya hayati ikan (Aman lingkungan). Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan oleh pengawasan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan internasional. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPMHKP maka ditetapkanlah misi pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yaitu: "Mewujudkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional yaitu Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan

Terpercaya”. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Arah kebijakan pembangunan BPPMHKP tahun 2026 adalah kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (*sovereignty*), pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan (*sustainability*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (*prosperity*).

## Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya PerPres Nomor 38 Tahun 2023 tentang BPPMHKP telah memperluas cakupan fungsi nya dalam penyelenggaraan jaminan mutu, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini. Saat ini berdasarkan PerPres Nomor 38 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Pengelolaan sistem ketertelusuran dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
3. Pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat,

- surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan inspeksi pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, surveilans pada sertifikasi mutu penanganan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
  5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
  6. Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh uji, penerbitan sertifikat serta surveilans pada sertifikasi mutu produksi sumberdaya kelautan, penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar

dan regulasi nasional.

2. Mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan.
4. Mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai BPPMHKP – KKP
5. Memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian laboratoris, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.



8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

### Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025- 2029, maka sasaran kegiatan dan kondisi *outcome/impact* yang ingin dicapai Balai PPMHKP Semarang telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Indikator kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, oleh karena itu Balai PPMHKP Semarang telah menyusun Indikator Kinerja Utama yang dituangkan dalam Rencana Strategis 5 Tahunan (RENSTRA) tahun 2025 - 2029 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Kinerja Balai PPMHKP Semarang TA 2025

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                                 | TARGET |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1             | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                             | 1                          | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Semarang (%) | 70     |
|                  |                                                                                                                                        | 2                          | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Balai PPMHKP Semarang (%)    | 70     |
|                  |                                                                                                                                        | 3                          | Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (Lokasi)                                   | 1      |
|                  |                                                                                                                                        | 4                          | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)             | 99     |
| SK.2             | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar              | 5                          | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                           | 75     |
|                  |                                                                                                                                        | 6                          | Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                       | 75     |
| SK.3             | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 7                          | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                         | 92     |
|                  |                                                                                                                                        | 8                          | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                    | 71,5   |
|                  |                                                                                                                                        | 9                          | Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)                                                                                       | 100    |
|                  |                                                                                                                                        | 10                         | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                            | 87     |
|                  |                                                                                                                                        | 11                         | Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                               | 86     |
|                  |                                                                                                                                        | 12                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai PPMHKP Semarang (%)                         | 85     |
|                  |                                                                                                                                        | 13                         | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)                                               | 76     |
|                  |                                                                                                                                        | 14                         | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)  | 75     |

*RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI PPMHKP SEMARANG TAHUN 2026*

|  |  |    |                                                                    |    |
|--|--|----|--------------------------------------------------------------------|----|
|  |  | 15 | Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Unit)    | 1  |
|  |  | 16 | Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Semarang (Nilai) | 75 |

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2. Indikator Kinerja Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                                        |    | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                | TARGET |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1             | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                             | 1. | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)           | 72     |
|                  |                                                                                                                                        | 2. | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)               | 72     |
|                  |                                                                                                                                        | 3. | Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                 | 71     |
| SK.2             | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar              | 4. | Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%) | 71     |
|                  | Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan | 5. | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)                                                                                         | 82,5   |
|                  |                                                                                                                                        | 6. | Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                                        | 77     |
|                  |                                                                                                                                        | 7. | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                                       | 86,2   |
|                  |                                                                                                                                        | 8. | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)                                  | 86     |

| SASARAN KEGIATAN |     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                        | TARGET |
|------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 9.  | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)               | 92,1   |
|                  | 10. | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                   | 71,75  |
|                  | 11. | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%) | 77     |
|                  | 12. | Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)                                 | 3,5    |

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT . Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pengembangan dan pembinaan pengawasan mutu perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan mutu perikanan sesuai standar dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan mutu ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan dari hulu ke hilir.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (quality and

safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya malachite green pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

Rencana Kerja BPPMHKP tahun 2026 diarahkan untuk mencapai target- target kinerja pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaran pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Balai PPMHKP Semarang tahun anggaran 2026 sebesar **Rp. 8.309.523.000,-**. Alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai PPMHKP Semarang untuk mewujudkan target-

target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan refokusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Balai PPMHKP Semarang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada Balai PPMHKP Semarang Semarang Tahun 2026

| No                                                     | Kegiatan                                                                                                                  | Anggaran (Rp)        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                     | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                | 425.750.000          |
| 2.                                                     | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 61.000.000           |
| 3.                                                     | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan                       | 7.795.773.000        |
| <b>Total Anggaran Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026</b> |                                                                                                                           | <b>8.309.523.000</b> |

## Penutup

Rencana kerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Balai PPMHKP Semarang antara lain :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Dukungan Manajemen internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Balai PPMHKP Semarang pada tahun 2026 sebesar **Rp. 8.309.523.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan **Rp. 452.750.000,-**
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar **Rp. 61.000.000,-**
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan **Rp. 7.795.773.000,-**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN  
DAN PERIKANAN SEMARANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titis Candra Dewi  
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Ishartini**

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan Semarang



Ditandatangani  
Secara Elektronik

**Titis Candra Dewi**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN**  
**DAN PERIKANAN SEMARANG**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                                           | TARGET |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1             | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                | 1.                         | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)           | 72     |
|                  |                                                                                                                           | 2.                         | Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)               | 72     |
|                  |                                                                                                                           | 3.                         | Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                 | 71     |
| SK.2             | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 4.                         | Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%) | 71     |
| SK.3             | Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Semarang                                    | 5.                         | Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)                                                                                         | 82,5   |
|                  |                                                                                                                           | 6.                         | Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                                        | 77     |
|                  |                                                                                                                           | 7.                         | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                                       | 86,2   |
|                  |                                                                                                                           | 8.                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Persen)                                  | 86     |
|                  |                                                                                                                           | 9.                         | Indikator Kinerja Pelaksanaan Anqqaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                       | 92,1   |
|                  |                                                                                                                           | 10.                        | Nilai Kinerja Perencanaan Anqqaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Nilai)                                                                           | 71,75  |
|                  |                                                                                                                           | 11.                        | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Semarang (%)                                                         | 77     |
|                  |                                                                                                                           | 12.                        | Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Semarang (Indeks)                                                                                         | 3.5    |

## Data Anggaran

| N<br>o                                                 | Kegiatan                                                                                                                  | Anggaran (Rp)        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                     | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                | 452.750.000          |
| 2.                                                     | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 61.000.000           |
| 3                                                      | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan                       | 7.795.773.000        |
| <b>Total Anggaran Balai PPMHKP Semarang Tahun 2026</b> |                                                                                                                           | <b>8.309.523.000</b> |

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan Semarang



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Titis Candra Dewi